

BUPATI GORONTALO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU
PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

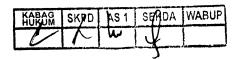
BUPATI GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor
 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
 Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah daerah
 menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan
 jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan
 Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan
 kebutuhan daerah masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, diperlukan peran serta masyarakat secara optimal dalam wadah institusi masyarakat bidang Keluarag Berencana di Kelurahan/Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intitusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana

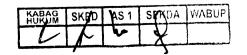
Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Π di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

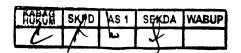
BAB I

KETENTUAN UMUM

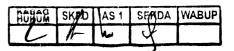
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

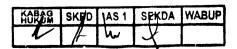
- 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo
- Pemerintah Daerah Adalah Bupati Gorontalo Dan Perangkat
 Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
 Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
- 4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- 5. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat berperan yang serta dalam pengelolaan program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat
- 6. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Program KKBPK adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
- 7. Kader adalah Kader IMP PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Gorontalo
- 8. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang



- untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional
- 9. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/Kelurahan. Pembantu Keluarga Pembina Berencana Desa yang selanjutnya disingkat **PPKBD** adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi sukarela berperan yang secara aktif melaksanakan dan mengelola Program **KKBPK** tingkat Desa/Kelurahan.
- 10. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa disebut selanjutnya Sub **PPKBD** adalah yang seorang atau beberapa orang kader wadah dalam organisasi sukarela yang secara berperan aktif melaksanakan dan mengeiola Program KKBPK tingkat Rukun Warga
- 11. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah Kelompok kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang Balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, social budaya, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainya dengan anak Balita
- 12. Bina Kelurga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap perilaku dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja baik fisik maupun intelektual, kesehatan reproduksi mental, emosional, sosial, moral spiritual secara seimbang melalui komunikasi efektif anatra orang tua atau keluarga remaja.



- 13. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang ilanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraan,
- 14. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah be-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.
- 15. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- 16. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan berkelanjutan.
- 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dan suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 18. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- 19. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



- 20. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
- 21. Pasangan usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang usia berkisar 20-45 tahun yang sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik
- 22. Unmet Need adalah PUS bukan peserta KB yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai rujukan para pengelola dalam memahami, melaksanakan dan memantau program KKBPK di Desa/ Kelurahan, Dusun/lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyatukan pengertian, persepsi dan pemahaman terhadap kedudukan tugas dan fungsi Kader serta langkah-langkah penting dalam pelaksanaan program di lapangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

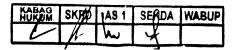
Ruang Lingkup Peraturan ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Kader dalam rangka peningkatan pencapaian Program KKBPK.

BAB IV KLASIFIKASI KADER

Pasal 4

Klasifikasi Kader terdiri atas 3 (tiga) yakni :

a. Kader Klasifikasi Dasar



- b. Kader Klasifikasi Berkembang
- c. Kader Klasifikasi Mandiri

Pasal 5

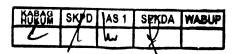
Kader Klasifikasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a melakukan peran :

- a. Pengorganisasian, sudah ada kepengurusan tetapi belum dilakukan pembagian tugas
- b. Pertemuan rutin, belum dilaksanakan secara rutin karena belum ada rencana kerja.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi kepada masyarakat
- d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan secara sederhana
- e. Pelayanan kegiatan KB, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, pil dan rujukan, Bina Keluarga (Minimal satu bina keluarga)
- f. Upaya kemandirian, melakukan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak sama sekali.

Pasal 6

Kader Klasifikasi Berkembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai peran

- a. Pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas kecuali untuk PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal.
- b. Pertemuan rutin, dilaksanakan secara rutin/bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi dan Komunikasi Inter Personal.
- d. Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola Reporting Recording.
- e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan UPPKS, Bina keluarga (minimal ada satu atau dua bina keluarga).
- f. Upaya kemandirian, melaksanakan dua upaya kemandirian.



Pasal 7

Kader Klasifikasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai peran:

- a. Pengorganisasian, Kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi.
- b. Pertemuan rutin, sudah dilaksanakan setiap bulan,
 berjenjang, membuat rencana Kerja dan notulen.
- c. Melakukan Konseling Informasi Edukasi dan Komunikasi Inter Personal
- d. Pencatatan, pendataan, dan pemetaan sudah mengikuti pola Reporting Recording
- e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan, UPPKS, Bina Keluarga lengkap.
- f. Upaya kemandirian, melaksanakan kegiatan kemandirian.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

(1) Kader terdiri atas perorangan atau kelompok yang diangkat ditetapkan oleh Desa/Kelurahan melalui Keputusan yang bertugas melaksanakan, mengelola, memberdayakan, menggerakan, menggalang serta mengembangkan kemitraan Program **KKBPK** di Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Kader

Pasal 9

Di dalam Pelaksaan kegiatan, Kader mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. Pengorganisasian.

KABAS	SKAD	WS 1	SEKDA	WABUP
HUKSM	U.P.			
		1	1 7/	1 I
1			<u> </u>	

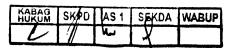
- 1. Sebagai wadah berbagai kegiatan ditingkat Desa,Kelurahan,Dusun dan lingkungan memerlukan kepengurusan yang paripurna.
- 2. Kepengurusan secara kolektif, dan dapat dibagi pembagian kerja dalam menjalankan peran.
- 3. Mengembangkan kemampuan kader dalam program KKBPK diwilayah kerja.

b. Pertemuan Rutin

- Pertemuan rutin dilaksanakan secara berjenjang dan berkala ditingkat Desa dan Kecamatan.
- Pertemuan rutin ditingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh
 PKB sebagai Pembina wilayah kerja
- 3. Pertemuan rutin ditingkat kecamatan dipimpin oleh koordinator PKB Kecamatan
- 4. Pertemuan rutin menjadi wadah untuk menyampaikan informasi, data, bimbingan,pembinaan, Evaluasi, pemecahan masalah, dan perencanaan program KKBPK di lapangan.

c. Konseling Informasi Edukasi

- Kader Program KKBPK melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling, program KKBPK.
- 2. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang mandiri dan lestari.
- 3. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan Ibu dan keluarganya.
- 4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga.
- Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
- 6. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.



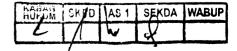
- 7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berusia diatas 60 Tahun keatas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- 8. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antar orang tua dan anak remaja.
- 9. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan keluarga ekonomi dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
- d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran.
 - 1. Kader Program KKBPK melakukan kegiatan pencatatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan.
 - 2. Bersama Penyuluh KB sebagai Pembina wilayah melakukan pemetaan sasaran (Demografi, tahapan KS, dan lainnya)
 - 3. Kader Program KKBPK memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan diwilayah.
 - 4. Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan diwilayah berdasarkan peta PUS yang dibuat.

e. Pelayanan Kegiatan

- 1. Pendewasaan usia perkawinan, Kesehatan reproduksi, Penaggulangan HIV/AIDS serta NAPZA.
- 2. Pengaturan kelahiran, Pembinaan PUS peserta KB dan Penggerakan pelayanan bagi PUS yang belum ber KB
- 3. Pembinaan ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL)
- 4. peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi lainnya.

f. Kemandirian

1. Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulangan (Pil dan Kondom)



- 2. Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk setempat,
- 3. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB.

BAB VI

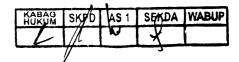
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 10

- (1) Kader pelaksananaan program KKBPK melakukan pencatatan program setiap bulan pada jenjang tugas masingmasing.
- (2) Formulir pencatatan yang dilaksanakan oleh kader sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Formulir Kader PPKBD
 - 1. Pendataan Keluarga
 - 2. Pemutahiran Data Keluarga
 - 3. Pembuatan Peta Program Desa/Kelurahan
 - 4. Pencatatatan rekapan PUS
 - 5. Pengendalian Lapangan Tingkat Desa (C1. Dal Des)
 - b. Formulir Kader SUB PPKBD
 - 1. Pendataan Keluarga
 - 2. Pemutahiran Data Keluarga
 - 3. Pembuatan Peta Program Dusun/Lingkungan
 - 4. Pencatatatan Register PUS (R.1 PUS)
 - 5. Buku bantu unmet need
 - 6. Buku bantu Ibu hamil
- (3) Selain pencatatan sebagaimana ayat (2), Kader melaksanakan pencatatan lainnya yang diperintahkan oleh Koordinator penyuluh KB, Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kader dalam pelaksanaan program KKBPK melakukan pelaporan program setiap bulan pada jenjang tugas masingmasing yang disampaikan Kepada Kepala Desa/Kelurahan setiap Bulan
- (2) Formulir pelaporan sebagaimana dimasud dalam ayat (1) terdiri terdiri dari;
 - a. Formulir Kader PPKBD
 - 1. Pencatatatan Register PUS (R.1 PUS)
 - 2. C.1 Dal-Des
 - 3. Laporan Tribina
 - b. Formulir Kader SUB PPKBD
 - 1. Pencatatatan Register PUS (R.1 PUS)
 - 2. Laporan Buku bantu unmet need
 - 3. Buku bantu Ibu hamil
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SYARAT PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KADER

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 12

- (1) Untuk diangkat menjadi Kader harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat keterangan sehat
 - b. Usia Minimum 20 Tahun, Maksimal 55 Tahun.
 - c. Pendidikan minimal SLTP Sederajat
 - d. Berdomisili diwilayah kerja dibuktikan dengan KTP
 - e. Bekerja sepenuh waktu dengan mengiisi surat pernyataan

KABAG HUKUM	SK/D	AS 1	SEKPA	WABUP
	/,	W	X	

- f. Tidak merangkap jabatan dalam tugas-tugas lain di desa dan kelurahan.
- g. Mampu berbahasa dan bercakap dengan benar dan memahami bahasa lokal setempat.
- h. Mengisi surat persetujuan Istri/Suami yang sudah menikah atau Orang tua yang belum menikah
- i. Masa jabatan PPKBD selama 1 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf h, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 13

Tata Cara pengangkatan Kader PPKBD dan Sub PPKBD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat membuka penerimaan Kader PPKBD dan SUB di wilayah Kerja.
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat menyeleksi kader sesuai pasal 8 ayat (a).
- c. Pemerintah Desa dan Kelurahan memverifikasi dan menyeleksi calon kader yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 12
- d. Kader yang diusulkan harus mendapatkan Rekomendasi dari Koordinator Penyuluh KB Kecamatan sebelum diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Desa dan kelurahan mengusulkan dan me

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 14

Kader diberhentikan:

1. Meninggal Dunia;

KABAG HUKUM	SKI	U	AS 1	SE	K	PΑ	WABUP
				5	Z		

- 2. Mengundurkan diri; dan
- 3. Tidak menghadiri pertemuan ditingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 15

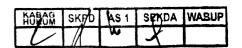
- (1) Koordinator Penyuluh KB mengevaluasi hasil kerja kader disetiap tingkatan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator penyuluh KB memberi rekomendasi kepada Kepala Desa/Kelurahan terhadap Kader yang tidak melaksanakan tugas dan Fungsi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar Kepala Desa/Kelurahan untuk menunda Pembayaran Honor Kader.

BAB IX

HONORARIUM DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Kader diberikan honororium setiap bulan atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi yang disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Dasar Pemberian Honorarium mengacu pada jumlah PUS diwilayah kerja masing-masing dengan klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster 1 dengan jumlah PUS 0 sampai dengan 300 PUS
 - b. Klaster 2 dengan jumlah PUS 301 sampai dengan 500
 PUS keatas
- (3) Honorarium Kader bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Kelurahan Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Gorontalo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat



Belanja Kabupaten Gorontalo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan kinerja Kader dilakukan oleh Bupati Gorontalo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang secara teknis dilaksanakan bersama-sama oleh Kepala Desa dan Koordinator Penyuluh KB
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi pencatatan dan pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas fungsi, kewajiban dan pemantauan penerimaan hak;
 - b. Melaksanakan Bimbingan teknis serta pelatihan tertentu;dan
 - c. Memberikan penghargaan atas prestasi Kader.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

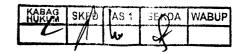
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kader yang telah diangkat melalui surat keputusan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir masa tugas dan atau dilakukan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 13 Januar 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 13 Januan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSTITUSI MASYARAKAT

PEDESAAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA DAN SUB

PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA

SURAT KETERANGAN SEHAT

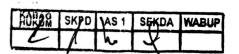
A. Format Surat Keterangan Sehat

Yang bertanda tangan d	i bawah ini Dokter
menerangkan:	
Nama	:
Tempat /tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Surat keterangan sehat	ini dipergunakan sebagai
Demikian surat keteran	gan ini dibuat untuk dapat dipergunakar
sebagaimana mestinya	
, .tanggal .	
Dokter Pemeriksa,	

B. Format Surat Pernyataan Izin Suami/Istri

SURAT PERNYATAAN IZIN SUAMI/ISTRI

rang bertanda tangan d	ii bawan ini :
Nama	·:
Tempat /tanggal lahir	:
Pekerjaan	: :
Alamat	:
Dengan ini menyatakan	n bahwa saya mengizinkan istri saya :
Nama	:
Tempat /tanggal lahir	:
Alamat	:
Untuk menjadi Kader P	PPKBD/Sub PPKBD di Desa
Demikian surat pernya	taan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
, .tanggal	••••••
Hormat Saya,	

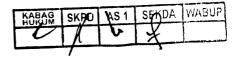


C. Format Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Sepenuh Waktu

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA BEKERJA SEPENUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Tempat /tanggal lahir :	
Pekerjaan :	
Alamat :	
Dengan ini menyatakan dengan sebe	enarnya bahwa saya sanggup
bekerja sepenuh waktu sebagai kad	ier PPKBD/SUB PPKBD Desa
Kecamatan da	an siap diberhentikan apabila
tidak mematuhi pernyataan ini.	
Demikian surat pernyataan ini saya bua	at dengan sebenar-benarnya.
, .tanggal	
Yang membuat pernyataan	



C/I	/n	es-D	al	/13

CATATAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA) TINGKAT DESA/KELURAHAN PADA PLKB

SKPD AS 1 SEKDA WABUP

•	KELURAHAN		:	
I.	KEADAAN UMUM			
NO.	URAIAN		BULAN	
				Dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah PPKBD yang dilaporkan			
2	Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan			
3	Jumlah kelompok KB yang dilaporkan			
4	Jumlah kelompok kegiatan BKB yang dilaporkan			
5	Jumlah kelompok kegiatan BKR yang dilaporkan			
6	Jumlah kelompok kegiatan BKL yang dilaporkan			
7	Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan			
II.	KEGIATAN OPERASIONAL			
NO.	URAIAN		BULAN	
140.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan			
2	Jumlah Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit			
3	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB			
III.	PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA			
NO.	URAIAN	•••	B U L A N	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB			
	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB c. hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS			
	Jumlah anggota kelompok Kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS e. dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB			
	i. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA			
2	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR			
	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan			

	d.	Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS		
	e.	Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I		
·	f.	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB		
	g.	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I		
/	h.	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR		
3	a.	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL		
	b.	Jumlan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL		
	c.	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan		
	d.	Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS		
	e.	Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I		
	f.	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB		
	g.	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I		
	h.	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL		

IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO.	URAIAN		BULAN	r
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS:			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS			
	b. Jumlah anggota kelompk UPPKS KPS dan KS I			
2	Status KB dari anggota kelompok UPPKS :	real and the second of the second		
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB			
	Anggota Khusus dari Kelompok KPS dan KS I			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang PUS			
	b. Jumlah PJS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang ber KB	:		
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS			
4	Jumlah Kelompok UPPKS yang dapat mengakses bantuan modal:			
4.1	Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/ mengakses bantuan modal pada bulan ini :			
	a. APBN			,
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			
4.2	Jumlah bantuan modal yang diakses pada bulan ini (juta rupiah):			
	a. APBN			
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/IUPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

_				
HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
	K	W	X	

C/I	/N	es-	n	2	/1	ĸ

CATATAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA) TINGKAT DESA/KELURAHAN PADA PLKB

-	KELURAHAN :		:		
I.	KEADAAN UMUM				
NO.	URAIAN		B U	LA	
(1)	(2)	(3)	-	(4)	(5)
1	Jumlah PPKBD yang dilaporkan		†		
2	Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan				
3	Jumlah kelompok KB yang dilaporkan				
4	Jumlah kelompok kegiatan BKB yang dilaporkan				
5	Jumlah kelompok kegiatan BKR yang dilaporkan				, ,
6	Jumlah kelompok kegiatan BKL yang dilaporkan				
7	Jumlah kelompok UPPKS yang dilaporkan	ALTERNATION ALEXANDER AND ALEX			
II.	KEGIATAN OPERASIONAL	*			
NO.	URAIAN		ВU	LA	N
NO.	ORATAN	•••		•••	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Jumlah Frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan				
2	Jumlah Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit			-	
3	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang aktif melakukan KIE KB				
III.	PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA				
NO.	URAIAN		B U	L A	N
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB				
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB				
	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB c. hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan				
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS				
-	e. Jumlah anggota kelompok Kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS				
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi Peserta KB			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi g. Peserta KB KPS dan KS I				
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB				
	i. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA				
2	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR		-		
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR				
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan				
-			KABAC	ever	I AS 1 SEKDA W

		<u> </u>		
-	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB			
	g. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR			
3	a. Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL			
	b. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL			
	c. Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan		o	
	d. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS			
	e. Jumlah anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I			
	f. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB			
	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi Peserta KB KPS dan KS I			
	h. Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL			

	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA			
NO.	URAIAN		BULAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS			
	b. Jumlah anggota kelompk UPPKS KPS dan KS I			
2	Status KB dari anggota kelompok UPPKS:			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB			
	Anggota Khusus dari Kelompok KPS dan KS I			
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I yang PUS			
	b. Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang ber KB			
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS			
4	Jumlah Kelompok UPPKS yang dapat mengakses bantuan modal:			
4.1	Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/ mengakses bantuan modal pada bulan ini :			
	a. APBN		,	
	b. APBO			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya	, ,		
4.2	Jumlah bantuan modal yang diakses pada bulan ini (juta rupiah):			
	a. APBN			A ·
	b. APBD			
	c. Krista			
	d. KUR			
	e. PNPM			
	f. Lainnya			

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/IUPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

KABAG HUKAM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABU
	1	V	*	

Lembar Sambungan C/I/Des-Dal/13

v. HASIL PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB MENURUT TAHAPAN KS, TEMPAT PELAYANAN DAN STATUS PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

	ESEKTA JAMINAN KESEH		B U L A N						
NO.	U	RAIAN	Tahapan	KS	Peserta JKN				
			Seluruh Tahapan KS	KPS DAN KS I	PBI	Bukan PBI			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	(PUS)							
2	Jumlah Peserta KB Aktif								
		Pemerintah			10.000				
	a. IUD (I)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)			on a months of deplication of conditional deplications.				
		Pemerintah							
-	b. MOW (OW)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)			2				
		Pemerintah							
	c. MOP (OP)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)							
		Pemerintah							
	d. Kondom (K)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)							
		Pemerintah							
	e. Implan (IP)	Swasta		-					
		Total (Pemerintah + Swasta)							
		Pemerintah							
	f. Suntik (S)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)							
		Pemerintah							
	g. Pil (P)	Swasta							
		Total (Pemerintah + Swasta)							
3	Jumlah Pasangan Usia Subui	bukan Peserta KB							
	a. Hamil	(H)							
	b. Ingin Anak Segera	(IAS)			Antoniale in the section of the sect				
	c Ingin Anak Ditunda	(IAT)							
	d Tidak Ingin Anak Lagi	(TIAL)							

Sumber Data Pengisian Formulir ini dari C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/IUPPKS/13, R/I/PUS/13, R/I/Toma-Toga-Toda/13

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABU
U		4.	J.	

Keterangan Cara Pengisian Formulir : C/I/Des-Dal/13

Æ	۵	Data Wilayah		
-		Desa/Kelurahan		: Diisi nama desa/kelurahan dengan nurui cetak
7		Kecamatan		. Diisi nama kecamatan dengan nurui cetak
က		Nama PLKB		: Diisi dengan nama PLKB dengan nurut cetak
4		Tahun		: Diisi dengan tahun saat mengisi C///Des-Da// I 3
æ	ä	Data Tabel I. Keadaan Umum		
		Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari		CAI/BKB/13, CAI/BKR/13, CAI/BKL/13, CAI/UPPKS/13
τ-		Jumlah PPKBD yang dilaporkan	Kolom 3-14	. Diisi dengan angka PPKBD yang melapor sesuai bulan kegiatan
2		Jumlah Sub PPKBD yang dilaporkan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka Sub PPKBD yang melapor sesuai bulan kegiatan
က		Jumlah Kelompok KB yang dilaporkan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka Kelornpok KB yang melapor sesual bulan keglatan
4		Jumlah Kelompok Kegiatan BKB yang dilaporkan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKB yang melapor sesual bulan kegiatan
5		Jumlah Kelompok Kegiatan BKR yang dilaporkan	Kolom 3-14	Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKR yang melapor sesuai bulan kegiatan
9		Jumlah Kelompok Kegiatan BKL yang dilaporkan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka Kelompok Kegiatan BKL yang melapor sesual bulan kegiatan
7		Jumlah Kelompok UPPKS yang dilaporkan	Kolom 3-14	:Diisi dengan angka Kelompok UPPKS yang melapor sesuai bulan keglatan
ပ	ũ	Data Tabel II. Kegiatan Operasional		
		Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari		: R//Toma-Toga-Toda/13
-		Jumlah Frekwensi Rakor KB Tingkat Desa/Kelurahan	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka frekwensi Rakor KB tingkat Desa/Kelurahan sesuai bulan kegiatan
٠ ,		i.mloh Erakwansi KIF dengan mengginakan KIE Kit	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka frekwensi KIE dengan menggunakan KIE Kit sesuai bulan kegiatan
7 (Julian First Manual At Anna (Anna) Anna a Leit majakinkan KIFKB	Kolom 3-14	:Diisi dengan angka tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif melakukan KIE KB sesuai bulan kegiatan
m		Jumiah Tokon MasyarakavAgamarAdat yang anumanan merandah No		
c		Data Tahel III. Pembinaan Ketahanan Keluarga		
i		Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari		CAI/BKB/13, CAI/BKR/13, CAI/BKL/13, CAI/UPPKS/13
<u>4</u>	Ø	-	Kolom 3-14	:Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan
4	Ω	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB	Kolom 3-14	:Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan
10	ပ		Kolom 3-14	:Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan sesuai bulan kegiatan
19	σ		Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS sesuai bulan
1	. 0		Kolom 3-14	kegiatari . Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang berstatus PUS KPS dan KS l sesuai hulan kegiatan
7-	4	perstatus FOS NFS dan NS I Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi peserta KB	Kolom 3-14	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi peserta KB sesuai hulan kediatan
19	D		Kolom 3-14	. Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menjadi peserta KB KPS dan KST sesuai bulan kediatan
		dan KS I		

\$ 'S	•						_										
. Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB sesuai bulan kegiatan . Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB menggunakan KKA sesuai bulan kegiatan	:Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif dalam pertamuan/penyuluhan sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan	ː Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan	:Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan	. Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang berstatus PUS KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKL sesuai bulan kegiatan	. CAA IPPKS/13
Kolom 3-14 Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolorn 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	Kolom 3-14	
Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKB Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB mengqunakan KKA	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKR	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR hadir/aktif	dalam pertemuaryperiyululari Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang Kombotus DIIS	Juniah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKR yang berstatus PUS KPS dan KS I	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKR yang menjadi peserta KB KPS	uan no i Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan BKR	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan BKL	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL hadir/aktif dalam perjemuan/penyuluhan	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang	Derstatus PUS Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKL yang	berstatus FOS hard van No. Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan BKL yang menjadi peserta KB KPS		Data Tabei IV. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
£ ;= c ∵	2a a	2p p	2c c	2d d	2e e	74	23 9	2h h		3p	ა ვ	д Ж	3e e	3£	3g g	3h h	u G

: Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I sesuai bulan kegiatan

: Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS sesuai bulan kegiatan

Kolom 3-14 Kolom 3-14

Jumlah Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok UPPKS

<u>, .</u>;

Sumber Data Pengisian Tabel Ini Darı

a. Jumlah anggota kelompok UPPKS

b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I2. Status KB dari Anggota UPPKS

Anggota Keseluruhan

: C/I/UPPKS/13

: Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal sesuai bulan kegiatan :Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang Ber KB sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang PUS sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang Peserta KB sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah anggota kelompok UPPKS yang PUS sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah pertemuan kelompok UPPKS sesuai bulan kegiatan Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 4.1 Jumlah Kelompok UPPKS yang Memperoleh/Mengakses bantuan Modal Pada Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I yang Ber KB a. Jumlah Anggota Kelompok UPPKS KPS dan KS I yang PUS b. Jumlah PUS Anggota Kelompok UPPKS yang Peserta KB Jumlah Anggota Kelompok UPPKS Yang PUS Anggota Khusus Kelompok KPS dan KS I 3. Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS

٩

- Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 Kolom 3-14 **Bulan Ini** KRISTA PNPM APBN APBD KUR ف Ö ö
- :Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari KRISTA sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari PNPM sesuai bulan kegiatan Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari APBN sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari APBD sesuai bulan kegiatan . Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoieh/diakses bantuan modal dari sumber lainnya sesuai bulan : Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal dari KUR sesuai bulan kegiatan Diisi dengan angka jumlah bantuan modal yang diperoleh/diakses bantuan modal sesuai bulan kegiatan Kolom 3-14 Jumlah Bantuan Modal Yang Diperoleh/Diakses Pada Bulan Ini

Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari sumber lainnya sesuai

bulan kegiatar

kegiatan

kegiatan

Kolom 3-14

LAINNYA

LAINNYA

PNPM

KRISTA

KUR

ö

APBD

APBN

4.2

kegiatan

kegiatan

Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari PNPM sesuai bulan

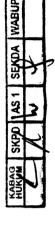
Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KUR sesuai bulan

Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari KRiSTA sesuai bulan

Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBD sesuai bulan

kegiatan

Diisi dengan angka jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dari APBN sesuai bulan



Keterangan Cara Pengisian Formulir : Lembar Sambungan C/I/Des-Dal/13

F. HASIL PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB MENURUT TAHAPAN KS, TEMPAT PELAYANAN DAN STATUS PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Sumber Data Pengisian Tabel Ini Dari

R/I/PUS/13

1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) menurut kelompok Kolom 3-50

tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS dan KS I) dan status peserta Jaminar. Kesehatan

Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif pada kolom tahapan KS (seluruh Kolem 3-50 2. Jumlah Peserta KB Aktif

sesuai bulan kegiatan

. Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif IUD melalui jalur pelayanan Kolom 3-50

pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan Pemerintah

pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif IUD melalui jalur pelayanan swasta Kolom 3-50

Swasta

9

Total

Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif IUD pada kolom tahapan KS Kolom 3-50

(seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOW melalui jalur pelayanan Pemerintah Kolom 3-50

pemerintah sepada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta

Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOW melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Kolom 3-50

Swasta

№

Total

Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif MOW pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Kolom 3-50

Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOP melalui jalur pelayanan Pemerintah Kolom 3-50

pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan

Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan

SEKDA WABUP

-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif MOP melalui jalur pelayanan swasta spada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan		 -50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Kondorn melalui jalur pelayanan pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan 	-50 : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Kondom melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan	• •	• •	50 Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Implan melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan	 Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Implan pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan 			• •
Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-5	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50
Swasta	Total	Pemerintah	Swasta	Total	Pemerintah Kolom 3-50	Swasta	Total	Pemerintah	Swasta	Total
MOP			Kondom			Implant			Suntik	

pemerintah pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status status peserta : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Pil melalui jalur pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan Pemerintah Kolom 3-50



• *	•	_		_	_	<u>.</u>
: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah peserta KB aktif Pil melalui jalur pelayanan swasta pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status status peserta Jaminan	Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah total peserta KB aktif Pil pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan	: Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Hamil pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan	Kesenatari Nasional (Fibridae Dukairi Dr.) Sosual barah Najakari EDiisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Ingin Anak Segera pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan	Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Ingin Anak Ditunda pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta	Jaminan Kesenatan Nasional (Terlidan Dukan Fe) 3030an Dukan Nasionan Reserta KB karena : Diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB karena Tidak Ingin Anak Lagi pada kolom tahapan KS (seluruh tahapan KS dan KPS/KSI) dan status peserta Jaminan Kesehatan Nasional (PBI dan Bukan PBI) sesuai bulan kegiatan
Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50	Kolom 3-50
Swasta	Total					
Ī	=	3. Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB	a. Hamil	b. Ingin Anak Segera	c. Ingin Anak Ditunda	d. Tidak Ingin Anak Lagi

WABUP	
-	_
SEKDA	*
AS 1	3
SKORD	1
KABAG HOKAR	7

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA

BULAN
DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN:
TAHUN
KABUPATEN

NO	URAIAN KEGI	ATAN	JUMLAH	KET
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI S KEGIATAN	ASARAN KELOMPOK		
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI A KEGIATAN	ANGGOTA KELOMPOK		_
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI A KEGIATAN YANG HADIR DALAM PERT			
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGI STATUS PUS	ATAN YANG BER		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGI KPS DAN KS.1	ATAN YANG BERSTATUS PUS		
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK I PESERTA KB	KEGIATAN YANG MENJADI		
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK I PESERTA KB KPS DAN KS.I	KEGIATAN YANG MENJADI		
8	JUMLAH PERTEMUAN KEGIATAN KEL	ОМРОК		
9	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI A	ANGGOTA MENGGUNAKAN		
10	JUMLAH KADER			
		KELOMPOK UMUR		
		0- < 1 Thn		
	JUMLAH BALITA YANG DIMILIKI KELO	DN 1 - < 2 Thn		
11	KELUARGA MENJADI SASARAN	2- < 3 Thn		
	KELOMPOK	3 - < 4 Thn		
		4 - < 5 Thn		
		5 - < 6 Thn		
		JUMLAH		

KADES / LURAH	KETUA KADER BKB

HOROG	SKPO	AS 1	SEKDA	WABUP
U	K	1	X	

LAPORAN BULANAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA

BULAN
DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN:
TAHUN
KABUPATEN

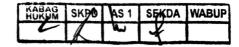
NO	URAIAN KEGIATAI	JUMLAH	KET	
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASA KEGIATAN			
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANG KEGIATAN	GOTA KELOMPOK		
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANG KEGIATAN YANG HADIR DALAM PERTEMU	1		
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATA STATUS PUS	N YANG BER		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATA PUS KPS DAN KS.1	N YANG BERSTATUS		
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGI PESERTA KB			
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGI PESERTA KB KPS DAN KS.I			
	KI	ELOMPOK UMUR		
	10	0- < 11 Thn		
	1:	1 - < 12 Thn		
	12	2- < 13 Thn		
	1	3 - < 14 Thn		
	1.	4 - < 15 Thn		
	1	5 - < 16 Thn		
11	1	6 - < 17 Thn		
	1	7 - < 18 Thn		
	1	8 - < 19 Thn		
	1	9 - < 20 Thn		
	2	0- < 21Thn		
	2	1 - < 22 Thn		
	2	2 - < 25 Thn		
	2	23 - < 24 Thn		
	JUMLAH RREMAJA	UMLAH		

MENGETAHUI KADES / LURAH

.....

KETUA KADER BKR

.....



LAPORAN BULANAN KEGIATAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA

BULAN
DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN:
TAHUN
KABUPATEN

NO	URAIAN KEGIATA	JUMLAH	KET	
1	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI SASARA			
2	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGO	OTA KELOMPOK		eric and agreement of the second of the seco
3	JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGO KEGIATAN YANG AKTIF DALAM KEGIATAN	OTA KELOMPOK		
4	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK KEGIATAN PUS	YANG BER STATUS		
5	JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK YANG MAS KPS DAN KS.1			
6	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIAT PESERTA KB	FAN YANG MENJADI		
7	JUMLAH PUS ANGGOTA KELOMPOK KEGIAT PESERTA KB DARI KPS DAN KS.I	FAN YANG MENJADI		
		50 > 60 TAHUN		
8	JUMLAH LANSIA	60 > TAHUN		
9	JUMLAH PERTEMUAN/PENYULUHAN			
10	JUMLAH KADER			

	·•	
MENGETAHUI KADES / LURAH		KETUA KADER BKR

KABAO HUKUM	SKAD	AS 1	SEKDA	WABUP
		W	X	

DATA UNMEET NEED

KECAMATAN KABUPATEN GORONTALO

NO	NO NAMA AKSEPTOR UMUR NAMA		NAMA SUAMI	JML	UMUR ANAK	ALAMAT	UNME	UNMEET NEED		
		+		ANAK	TERKECIL	A-CIVIA I	IAT	TIAL		
1		1								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9			,	*						
10										
11										
12										
13				4						
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25							7			
dst	J							1		

KABAG	SKAD	AS 1	SEKDA	WABUP
		U	J	i

DATA IBU HAMIL DAN PREDIKSI KELAHIRAN

DESA KECAMATAN

NO NAMA UI		HMHR	MUR BULAN				i	ALAMAT				
	MAIN	ONION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ALAWAI
1			,									
2												
3												
4												here entregge and applying the party and the applying and the party and the applying and applying an applying and applying an applying a applying an applying an applying an applying an applying an applying an applying a applying an applying a applying a applying a applying a applying a applying an applying a applying
5												
6						,						
7												
8												
9						-						
10												
11												er wantan a farantiiska ar a saan and a special same
12												
13											,	
14												
15												
16												•
17								ļ				
18		ļ										
19												
20				-								
21					<u> </u>							
22				ļ								
23					ļ							
24					1			<u> </u>		<u> </u>		
25					<u> </u>	ļ						
dst												

KABAG HUKUM	SKB	AS 1	SEKDA	WABUP
	P	W	X	

REKAPAN DATA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KB AKTIF DAN BUKAN PESERTA KB

	-				,			,		,	,	,
	KET											
ERTAK	IN.				<u> </u>							
AN PES	TIAL											
JS BUK	IĀ.											
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB	IAS											
) N	HAMIL						-					
	PBI HA						-					
PESERTA JKN	NON											
PESE	88											
	s											
님	۵											
N.	BB											
PESERTA JKN	NON											
8	8						ļ					
SUNTIK	S											
S	P8 P8											
PESERTA JKN	NON											
PESER	<u>8</u>											
IMPLANT	s											
Σ	٩											
PESERTA JKN	NON IN											
PESE	<u>8</u>											
KONDOM	s											
- Š	-											
PESERTA JKN	NON											
PESE	PBI											
MOP	S d											
PESERTA JKN	NON PBI											
	PB											
MOW	S											
IKN	NON											
PESERTA JKN	PBI											
ınp	s											
	۵											
Sig H) -											
/NOSOG	LINGK											JUMLAH
9	2	1	2	3	4	5	9	7	80	6	10	Ng

KADER PPKBD KEL./DESA

